

DAFTAR ISI

Teks	Halaman
SAMPUL DEPAN -----	i
SAMPUL DALAM -----	ii
PENGESAHAN -----	iii
KATA PENGANTAR -----	v
ABSTRAK -----	viii
ABSTRACT -----	ix
DAFTAR ISI -----	x
DAFTAR GAMBAR -----	xiii
DAFTAR TABEL -----	xv
DAFTAR LAMPIRAN -----	xvi
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	10
C. Tujuan Penelitian -----	10
D. Manfaat Penelitian -----	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA -----	12
A. Landasan Teori -----	12
1. Teori Negara Hukum dari F.J. Stahl -----	12
2. Teori Kedaulatan Rakyat dari J.J. Rousseau -----	18
3. Teori Pembagian Kekuasaan dari Montesquieu -----	25
4. Teori Keadilan Sosial Menurut UUD NRI 1945 -----	29
5. Teori Pembangunan Berkelanjutan dari Brundtland -----	34

6. Teori Partisipasi Masyarakat dari David Korten -----	37
B. Sistem Pemerintahan -----	44
1. Sistem Pemerintahan PresidensiL -----	46
2. Sistem Pemerintahan Parlementer -----	56
C. Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945 -----	65
D. Perencanaan Pembangunan Nasional -----	96
E. Kerangka Konseptual -----	107
1. Diagram Kerangka Konseptual -----	110
2. Hipotesis -----	111
3. Defenisi Operasional -----	113
BAB III. METODE PENELITIAN -----	120
A. Jenis Penelitian -----	120
B. Jenis Pendekatan -----	120
C. Sumber Bahan Data -----	121
D. Teknik Pengumpulan Data -----	122
E. Analisis Data -----	123
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	125
A. Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 -----	125
1. Perencanaan Pembangunan Era 1945-1949 (Perang Mempertahankan Kemerdekaan) -----	126
2. Perencanaan Pembangunan Era 1950-1959 (Demokrasi Liberal Menuju Demokrasi Terpimpin)-----	133
3. Perencanaan Pembangunan Era 1960-1965	

(Kembali ke UUD 1945; Demokrasi Terpimpin Berbasis Nasakom)-----	141
4. Perencanaan Pembangunan Era 1966-1998 (Dari Stabilisasi dan Rehabilitasi Hingga Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama dan Kedua)-----	148
5. Perencanaan Pembangunan Era 1998-2004 (Reformasi dan Amendemen Konstitusi)-----	172
B. Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 -----	180
1. Perencanaan Pembangunan Era 2005-2025 (Kesinambungan Pembangunan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial)-----	180
2. Kelebihan Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Amendemen Model SPPN-RPJPN-RPJMN -----	188
3. Kekurangan Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Amendemen Model SPPN-RPJPN-RPJMN -----	267
BAB V. PENUTUP -----	334
A. Kesimpulan -----	334
B. Saran -----	335
DAFTAR PUSTAKA -----	337
LAMPIRAN -----	349

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Pergeseran Paradigma Pembangunan dari <i>Production Centered Development</i> ke <i>People Centered Development</i> -----	38
2.	Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Nasional di era otonomi daerah -----	43
3.	Struktur kelembagaan Negara pasca Amendemen UUD 1945 -----	92
4.	Kerangka Konseptual Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amendemen UUD 1945 -----	110
5.	Struktur kebijakan perencanaan pembangunan di Masa Orde Baru (1969-1998) -----	162
6.	Siklus Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintahan Orde Baru (1969-1998) -----	164
7.	Alur Perencanaan Pembangunan dalam Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung -----	185
8.	Perubahan paradigma perencanaan pembangunan dari Pola GBHN ke Pola SPPN -----	188
9.	Hubungan antara berbagai dokumen perencanaan menurut UU No. 25 Tahun 2004 -----	194

10. Sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan UU lainnya -----	200
11. Peranan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mensinergikan Perencanaan-Penganggaran di Daerah -----	201
12. Hubungan Kerja ideal antara Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya -----	202
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ideal dan komprehensif menurut UU No. 25 Tahun 2004 -----	208
14. Hubungan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan pengelolaan anggaran -----	245
15. Implementasi program perencanaan dan penganggaran periode RPJMN I (2004-2009)-----	324

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Perbedaan sistem pemerintahan presidensil, parlementer dan semi parlementer -----	62
2.	Nama Kabinet, masa pemerintahan dan nama rencana pembangunan pada periode pemerintahan 19501-1959 -----	134
3.	Pokok-pokok perubahan terkait perencanaan pembangunan Dalam Amandemen Konstitusi 1999-2002 -----	175
4.	Perbedaan GBHN Era Orde Baru terakhir (1998) dengan GBHN di Era Reformasi (1999) -----	178
5.	Kelemahan UU No. 25 /2004 tentang SPPN dibandingkan dengan UU lainnya dalam manajemen evaluasi-----	203
6.	Garis Besar perjalanan pembangunan di Indonesia dari Tahun 1945 sampai Tahun 2017 -----	234
7.	Pelaku pembuat dan jenis rencana dalam sistem pemerintahan presidensil -----	271

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Perkembangan Lembaga Perencanaan dan Dokumen Rencana Pembangunan Periode 1945-2017 -----	349
2.	Permasalahan Konsistensi perencanaan menurut UU 25/2004 Dan penganggaran menurut UU 17/2003 -----	354
3.	Permasalahan implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dan implementasi UU 17/2003 tentang Keuangan Negara ----	362